

Pelaksanaan kebijakan pengembangan Sekolah Luar Biasa (SLB) untuk Optimalisasi Pendidikan Inklusi (Studi SLB Sri Mujinab Pemerintah Provinsi Riau)

Else Maranatha¹ Kartius²

¹²Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Jl. Kaharuddin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia
e-mail : Elsemaranatha@student.uir.ac.id

Abstract

Sri Mujinab Pekanbaru Special School is one of the SLB level schools with private status located in the Sail District, Pekanbaru City, Riau. Sri Mujinab Pekanbaru Special School was established on June 8, 1999 under the auspices of the Ministry of Education and Culture. In learning activities. The Riau Provincial Education Office has changed the status of Sri Mujinab Pekanbaru City Special School to Sri Mujinab State Special School of Riau Province. The status of this state is stated in the Decree (SK) of the Riau Governor number kpts. 6951 / VIII / 2023 concerning the Change of the Sri Mujinab Pekanbaru City Special School Education Unit to Sri Mujinab Riau Province Special School. As a consequence of this state status change, all assets owned by the foundation will be handed over to the government. All operations of Sri Mujinab SLBN are also the responsibility of the Riau Education Office, just like other state SLBs, be it teaching staff, financing, improving the quality and development of schools, some facilities that have started to not function properly.

Keywords: Implementation, Policy, Development

Abstrak

Sekolah Luar Biasa Sri Mujinab Pekanbaru adalah salah satu sekolah jenjang SLB berstatus Swasta yang berada di wilayah Kec. Sail, Kota Pekanbaru, Riau. SLB Sri Mujinab Pekanbaru didirikan pada tanggal 8 Juni 1999 yang berada dalam naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam kegiatan pembelajaran. Dinas Pendidikan Provinsi Riau telah merubah status SLB Sri Mujinab Kota Pekanbaru menjadi SLB Negeri Sri Mujinab Provinsi Riau. Penegerian status ini tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Riau nomor kpts. 6951/VIII/2023 tentang Perubahan Satuan Pendidikan SLB Sri Mujinab Kota Pekanbaru menjadi SLB Sri Mujinab Provinsi Riau. Sebagai konsekwensinya dengan perubahan status negeri ini, maka seluruh aset yang dimiliki yayasan akan diserahkan ke pemerintah. Semua operasional SLBN Sri Mujinab juga menjadi tanggung jawab Disdik Riau sama seperti SLB negeri lainnya, baik itu tenaga pendidik, pembiayaan, peningkatan mutu dan pengembangan sekolah, beberapa fasilitas yang sudah mulai tidak berfungsi secara baik.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Kebijakan, Pengembangan

Pendahuluan

Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting untuk kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Sejalan dengan perkembangan zaman, pendidikan menjadi salah satu kebutuhan utama bagi bangsa ini. Di sisi lain, pendidikan dapat menjadi salah satu indikator kemajuan sebuah bangsa. Sistem Pendidikan Nasional merupakan sebuah usaha yang dirancang dengan sadar dan terencana, bertujuan untuk menciptakan suasana belajar serta proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk secara aktif mengembangkan potensi diri mereka. Ini mencakup penguatan spiritual keagamaan, kemampuan pengendalian diri, pembentukan kepribadian, pengembangan kecerdasan, pembinaan akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan oleh individu, masyarakat, bangsa, dan negara. SLB Sri Mujinab Pekanbaru merupakan salah satu sekolah jenjang SLB berstatus Swasta yang berada di wilayah Kec. Sail, Kota Pekanbaru, Riau. SLB Sri Mujinab Pekanbaru didirikan pada tanggal 8 Juni 1999 dengan Nomor SK Pendirian 7271/109.6.5/DS/1999 yang berada dalam naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan adanya keberadaan SLB Sri Mujinab Pekanbaru, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mencerdaskan anak bangsa di wilayah Kec. Sail, Kota Pekanbaru. Dinas Pendidikan Provinsi Riau telah merubah status SLB Sri Mujinab Kota Pekanbaru menjadi SLB Negeri Sri Mujinab Provinsi Riau. Penegerian status ini tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Riau nomor kpts. 6951/VIII/2023 tentang Perubahan Satuan Pendidikan SLB Sri Mujinab Kota Pekanbaru menjadi SLB Sri Mujinab Provinsi Riau. Penyerahan SK penegerian ini langsung diserahkan Kepala Dinas Provinsi Riau Dr. Kamsol kepada ketua yayasan dan kepala sekolah, Jumat (25/8) pagi di Kantor Disdik Riau.

Pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kota Pekanbaru melalui Dinas Pendidikan Provinsi Riau belum menunjukkan keberhasilan yang signifikan dalam pengembangan kualitas pendidikan, terutama dalam kemampuan Mengajar para guru oleh karena itu, diperlukan upaya dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau untuk memberikan pembinaan, pelatihan, dan pengawasan yang berkelanjutan terhadap kegiatan pembelajaran. Tujuannya adalah untuk mencapai mutu pendidikan yang lebih baik di Sekolah Luar Biasa (SLB). Menanggapi hal ini, Dinas Pendidikan Provinsi Riau, melalui tugas dan fungsinya, sepatutnya memberikan pembinaan kepada tenaga pendidik di setiap satuan pendidikan Sekolah Luar Biasa (SLB) demi kemajuan dan peningkatan mutu pendidikan di institusi tersebut. Kegiatan pembelajaran di Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kota Pekanbaru tidak terlepas dari tenaga pendidik tentunya berorientasi pada latar belakang pendidikan dan kemampuan tenaga pendidik dalam bidang pembelajaran. . Peran Dinas Pendidikan Provinsi Riau melalui program Pembinaan dan Pelatihan terhadap keberlangsungan kegiatan pembelajaran hal ini bertujuan agar meningkatkan kemaksimalan kegiatan pembelajaran bagi peserta didik Sekolah Luar Biasa (SLB) dan memiliki wawasan pengetahuan potensi tenaga pengajar yang didasarkan kurikulum dan peraturan yang telah ditetapkan berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pelaksanaan pembinaan mutu pendidikan Sekolah Luar Biasa (SLB) belum terlaksana dengan optimal.

Tinjauan Pustaka

Konsep Administrasi Publik

Administrasi berasal dari bahasa Yunani Kuno, yaitu "*ad+ministere*" dan "*ad+ministrate*" dari bahasa latin yang artinya "membantu, melayani dan memenuhi" serta

administration yang berarti “pemberian bantuan, pelaksanaan, pemeliharaan, pimpinan dan pemerintahan, dan pengelolaan”.

Menurut Sondang P Siagian administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Ada beberapa hal yang terkandung dalam definisi diatas. Pertama , administrasi sebagai seni adalah suatu proses yang diketahui. Kedua administrasi mempunyai unsur-unsur tertentu, yaitu adanya dua manusia atau lebih, adanya tujuan yang hendak dicapai.

Menurut Nawawi (Syafii, 2013:5) bahwa administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan proses pengendalian usaha kerja sama kelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Stephen P. Robbins (1983) “*Administrasi is the universal process of efficiently getting activities completed with and through other people*”. Robbins memahami administrasi ini sebagai keseluruhan kegiatan-kegiatan untuk pencapaian tujuan secara efisien melalui kerja sama dengan orang lain

Konsep Organisasi Publik

definisi organisasi yang telah dikemukakan oleh para ahli organisasi sekurang-kurangnya ada unsur sistem kerja sama, orang yang bekerja sama, dan tujuan bersama yang hendak dicapai. Seperti kita ketahui bahwa manusia dalam memenuhi kebutuhannya tidak bisa berdiri sendiri. Agar kebutuhan itu dapat terpenuhi, manusia harus berorganisasi dalam hal ini merupakan suatu alat organisasi yang diperlukan dalam masyarakat, karena tujuan tertentu hanya dapat dicapai lewat tindakan yang harus dilakukan dengan kerjasama.

Menurut Armosudiro dalam Fithriyyah (2021) organisasi adalah bentuk pembagian kerja dan bentuk tata komunikasi kerja antara dua orang atau lebih yang mempunyai kedudukan atau posisi dan bekerja secara tertentu dan secara bersama-sama guna tercapainya sasaran atau tujuan tertentu.

Konsep Manajemen Publik

Kata manajemen berasal dari bahasa inggris, yakni dari kata *to manage* yang berarti mengurus, mengelola atau mengatur. Oleh sebab itu apabila sesuatu organisasi atau kelompok orang yang gagal mencapai tujuannya sering disebut *missmanagement*, artinya salah urus, salah kelola salah pengaturan. Menurut Robbin atau Coulter (2019:3), manajemen merupakan suatu proses pelaksanaan koordinasi terhadap berbagai kegiatan pekerjaan secara efektif dan efisien dengan atau melalui orang lain.

Konsep Kebijakan Publik

Menurut Tachjan di (Herdiana, 2018) bahwa substansi kebijakan hakikatnya merupakan kesepakatan dari suatu keputusan dari beberapa rangkaian pilihan yang berhubungan satu sama lain. Kebijakan pada dasarnya ialah suatu kegiatan dari pemerintah yang mengatur kehidupan masyarakat maupun publik. Untuk menciptakan pembangunan yang optimal, pemerintah menciptakan beberapa kebijakan yang nantinya digunakan untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan utama dan menyelesaikan masalah di masyarakat. Lahirnya suatu kebijakan publik tidak lain karena landasan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat. Lahirnya suatu kebijakan publik tidak lain karena ada landasan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat. Tidak lain kegunaan kebijakan publik diorientasikan untuk pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang pada awal kebijakan telah ditetapkan oleh para pihak (*stakeholders*) (Ramdhani&Ramdhani,2017).

Konsep Implementasi

Makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008: 65), mengatakan implementasi merupakan memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadminstrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri. Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008:146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Implementasi kebijakan diperlukan untuk melihat kepatuhan kelompok sasaran kebijakan. Oleh karena itu, dilihat dari perspektif perilaku, kepatuhan kelompok sasaran merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Pemahaman ini sejalan dengan pandangan Ripley dan Franklin (1986: 12) bahwa untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan perlu didasarkan pada tiga yaitu :

1. tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di atasnya atau tingkatan birokrasi, sebagaimana diatur dalam undang-undang,
2. adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah; serta
3. pelaksanaan dan dampak (manfaat) yang dikehendaki dari semua program terarah.

Menurut (Karmanis & Karjono, 2020) implementasi merupakan suatu tahapan dari proses kebijakan publik, sebagai rangkaian aktivitas dalam rangka mencapai kebijakan yang telah ditetapkan kepada masyarakat, sehingga kebijakan tersebut mencapai hasil yang diinginkan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang.

Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program-program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

Pada aspek pelaksanaan, terdapat dua model implementasi kebijakan publik yang efektif, yaitu model linier dan model interaktif (Dye, 1981). Dengan kata lain, implementasi kebijakan atau program perlu dilakukan secara konsisten dengan menunjukkan keterkaitan elemen sistemnya.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif. Dilihat dari lingkup masalah dan tujuan yang akan dicapai, maka tipe penelitian ini adalah survey deskriptif, yaitu untuk menggambarkan fakta-fakta yang ada di Lapangan secara lengkap tentang objek yang di teliti. Peneliti menggunakan metode ini sebagai metode penelitian untuk mengetahui secara jelas tentang, Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Sekolah Luar Biasa Untuk Optimalisasi Pendidikan Inklusif (Studi pada Sekolah Luar Biasa/SLB Sri Mujinab Pemerintah Provinsi Riau) agar penelitian ini bisa menghasilkan analisis yang diperoleh kualitatif sehingga memperoleh jawaban dari suatu permasalahan yang di rumuskan.

Menurut Sugiyono (2018:213) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah atau (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif lebih menekan pada makna.

Metode ini bertujuan menganalisis dan mendeskripsikan fenomena atau obyek penelitian melalui aktivitas sosial, sikap dan persepsi orang secara individu atau kelompok.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil dan analisis data dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Ada beberapa indikator dan sub indikator yang penulis paparkan untuk mengetahui pembahasan dalam penelitian yang Berjudul Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Sekolah Luar Biasa (SLB) Untuk Optimalisasi Pendidikan Inklusi (Studi SLB Sri Mujinab Pemerintah Provinsi Riau). Indikator yang penulis gunakan dalam mencari dan menjawab hasil penelitian ini yaitu berdasarkan 4 indikator Menurut Smith (1973) dalam Islamy (2001), implementasi kebijakan dipandang sebagai suatu proses atau alur. Model Smith ini memandang proses implementasi kebijakan dari proses kebijakan dari perspektif perubahan social dan politik, dimana kebijakan yang dibuat pemerintah bertujuan untuk mengadakan perbaikan atau perubahan dalam masyarakat sebagai kelompok sasaran. Menurut Smith dalam Islamy (2001), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- a. *Idealized Policy*
- b. *Target Groups*
- c. *Implementing Organization*
- d. *Environmental Factors*.

1. *Idealized Policy*

a) Kebijakan perubahan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dilapangan mengenai indikator orubahan status maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah tertarik karena SLB tersebut salah satu SLB tertua di Pekanbaru dan mengambil alih Sekolah Luar Biasa Sri Mujinab dan menegerikannya menjadi Sekolah Luar Biasa Sri Mujinab Provinsi Riau dan Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang mau melaksanakan kebijakannya agar SLB tersbut lebihoptimal lagii dari yang sebelumnya .

b) Kebijakan pengembangan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dilapangan, Salah satu pilar utama pengembangan SLB ini adalah adanya kolaborasi dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau

lintas instansi hal ini menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan mutu pendidikan dan layanan bagi anak berkebutuhan khusus di SLB Sri Mujinab melalui kolaborasi aktif dengan berbagai pihak, termasuk instansi pendidikan tinggi, Dewan Pendidikan, pemerintah provinsi, komite sekolah, dan orang tua siswa. Kolaborasi ini mencakup aspek pembiayaan, pelatihan, teknologi, advokasi, dan pengawasan.

2. Target Group

a) Kepala Sekolah

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan mengenai indikator target group dan sub indikator kepala sekolah adalah setelah Sekolah Luar Biasa (SLB) Sri Mujinab di Provinsi Riau di negerikan, terjadi perubahan signifikan bagi guru dan siswa. Gaji guru kini ditanggung oleh pemerintah pusat, bukan lagi oleh sekolah. Selain itu, sekolah mendapatkan berbagai bantuan dana atau anggran Perubahan status menjadi sekolah negeri juga mendorong meningkatnya minat anak-anak berkebutuhan khusus untuk bersekolah di sana hal ini membantu anak menjadi lebih semangat dan termotivasi untuk belajar.

b.) tenaga pendidik

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan mengenai indikator target group indikator tenaga pendidik adalah menunjukkan bahwa tantangan Mengajar Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) merupakan tantangan tersendiri bagi para guru karena proses pembelajarannya membutuhkan kesabaran yang jauh lebih besar dibandingkan dengan anak-anak pada umumnya. Hal ini disebabkan karena setiap materi harus disampaikan secara perlahan dan berulang-ulang agar dapat benar-benar dipahami oleh siswa. Guru juga dituntut untuk memiliki fleksibilitas dalam mengajar, serta harus mampu menerapkan berbagai metode yang kreatif dan inovatif agar pembelajaran menjadi lebih efektif dan menarik bagi anak-anak tersebut. Proses ini tentunya membutuhkan waktu dan tenaga lebih, karena guru harus membangun kedekatan emosional, memahami latar belakang anak, serta terus beradaptasi dengan dinamika yang ada.

c.) Wali Murid

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan mengenai indikator target group indikator Pelayanan yang diberikan oleh Sekolah Luar Biasa Sri Mujinab Provinsi Riau dinilai cukup baik oleh orang tua siswa. Guru-guru di sekolah tersebut menunjukkan sikap yang sabar dalam mendampingi dan mengajar anak-anak berkebutuhan khusus, termasuk anak dari narasumber. Selain sabar, para guru juga dinilai memiliki kepedulian yang tinggi terhadap perkembangan peserta didik, Selain itu, guru-guru selalu sigap dalam menyampaikan informasi kepada orang tua, serta secara aktif mengajak berdiskusi mengenai hal-hal yang dapat mendukung dan meningkatkan perkembangan anak ke depannya.

3. Implementing Organization

Dinas Pendidikan Provinsi Riau Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan dalam melaksanakan kebijakannya, kesimpulan struktur koordinasi antara Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan SLB Sri Mujinab menunjukkan hubungan kerja yang jelas dan terarah, di mana Dinas Pendidikan berperan sebagai pembina dan pengawas, sedangkan SLB sebagai pelaksana layanan pendidikan khusus. Komunikasi dilakukan secara formal melalui kepala sekolah dan mengikuti regulasi dinas, sehingga seluruh kegiatan sekolah tetap berada dalam

koridor kebijakan yang ditetapkan. Koordinasi ini bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan dan pemenuhan kebutuhan siswa berkebutuhan khusus secara optimal.

a.) Kepala Sekolah

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan. Kebijakan ini bahwa sejak SLB Sri Mujinab dinegerikan, segala keputusan sekolah harus mengikuti birokrasi pemerintah, yaitu merujuk pada kebijakan dan aturan dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Selain itu, sekolah kini menerapkan prinsip pendidikan inklusif dengan menerima siswa Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) tanpa adanya batasan jumlah, sehingga semakin membuka akses pendidikan bagi semua anak yang membutuhkan layanan khusus.

4. Environmental Factors

a) Lingkungan

Dari hasil wawancara dan observasi di lapangan, lingkungan di sekitar Sekolah Luar Biasa (SLB) Sri Mujinab Provinsi Riau cukup mendukung dan menerima keberadaan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Tidak ada keluhan negatif dari masyarakat terkait keberadaan sekolah, bahkan mereka menunjukkan sikap ramah terhadap pihak sekolah, baik kepada saya maupun tenaga pendidik lainnya. Selama saya menjabat sebagai kepala sekolah, belum pernah ada laporan dari warga yang merasa terganggu oleh aktivitas siswa. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan sekitar SLB Sri Mujinab tergolong positif dan mendukung proses pendidikan inklusif.

b.) Perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, keberhasilan pelaksanaan kebijakan pendidikan khusus di SLB Sri Mujinab sangat dipengaruhi oleh dukungan dari sektor lain seperti sosial, kesehatan, keuangan daerah, dan dunia usaha. Sektor-sektor tersebut berperan penting dalam penyediaan layanan pendukung bagi anak berkebutuhan khusus. Tanpa adanya sinergi lintas sektor, kebijakan dari Dinas Pendidikan akan sulit berjalan optimal dan dampaknya menjadi terbatas di tingkat pelaksanaan.

Tabel 1. 1 Tenaga Pendidik Sekolah Luar Biasa Sri Mujinab Provinsi Riau

NO	NAMA	STATUS	JENJANG
1.	Adriningsih S.pd	PNS	S1
2.	Anggia Putri	GTY/PTY	S1
3.	Juliyarita Ismed S.pd	GTY/PTY	S1
4.	Juwadi S.pd	PNS	S1
5.	Lendrawati S.pd	PNS	S1
6.	Maimunah Z	PNS	S1
7.	Rahmad Hidayat, S.pd	PNS	S1
8.	Nelita Basni S.pd	GTY/PTY	S1
9	Tuti Afriyani	GTY/PTY	S1
10.	Windarti	GTY/PTY	S1
11.	Yuli Rixa Handini	GTY/PTY	S1

Sumber: Profil SLB Sri Mujinab

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Sekolah Luar Biasa (SLB) Untuk Optimalisasi Pendidikan Inklusi (studi SLB Sri Mujinab Pemerintah Provinsi Riau)

1. Dinas Pendidikan Provinsi Riau menunjukkan masih kurang optimal dalam melaksanakan kebijakannya sehingga Sekolah Luar Biasa Sri Mujinab Provinsi Riau tersebut masih belum bisa menjadi SLB unggulan karena banyak fasilitas-fasilitas sarana dan prasana yang belum terpenuhi
2. Setelah Sekolah Luar Biasa Sri Mujinab Provinsi Riau ini diambil alih oleh pemerintah dan di negerikan masih banyak kebijakan yang belum terlaksana oleh dinas pendidikan seperti rencana pembangunan ruangan kelas yang masih belum terlaksana.
3. Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang masih kurang dalam memperhatikan kebutuhan Sekolah Luar Biasa Sri Mujinab Provinsi Riau tersebut karena anak-anak disabilitas pasti harus memiliki kebutuhan yang khusus seperti mereka membutuhkan Guru yang lulusan Pendidikan Luar Biasa (PLB).

Daftar Pustaka

- Estitika Rochmatul Zulfa. 2019. *Pengembangan Kapasitas Sekolah Luar Biasa Untuk Meningkatkan Pelayanan Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (Studi Kasus Di SDLBN Kedungkandang Malang)*.
- Mohammad Muhassin. 2019. *Peranan Pendidikan Luar Biasa Dalam Pembinaan Anak Tunagrahita: Studi Pada Sekolah Luar Biasa (SLB) C Dharma Bakti Pertiwi Bandar Lampung. Luar Biasa (SLB) Di Semarang*.
- Maria Angelia Silalahi. 2019. *Tugas Dan Wewenang Dinas Pendidikan Provinsi Riau dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Atas*.
- Syahri Handrik JP. 2021. *Tugas Dinas Pendidikan Dan Dinas Pemuda Dan Olahraga Dalam Melakukan Pembinaan Dan Pengembangan Dan Pelestarian Olahraga Tradisional Asli Kuantan Singingi Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019 (Di Desa Langsat Hulu Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi)*.
- Scott, John. 2011. *Sosiologi The Keys Concepts*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suparno,dkk. 2007. *Bahan Ajar Cetak: Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*. Jakarta: Dirjen Dikti Depdiknas..
- Smith, J. (2020). *Kapasitas Kebijakan: Teori dan Praktik*. Jakarta: Penerbit Kebijakan.
- Richards, D & MJ Smith 2002 *Tata Kelola dan Kebijakan Publik di Inggris*, Oxford University Press, Oxford.
- Siagian, P, Sondang. 2003. *Filsafat Administrasi*. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.
- James, Hevery. 2000. *Sistem Informasi*. Jakarta: PT. Kencana
- Delphie, Bandi. 2006. *Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus*. Bandung: Refika Aditama.
- Atmosudidjo, Prajudi. 2004. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Maria Angelia Silalahi. 2019. *Tugas Dan Wewenang Dinas Pendidikan Provinsi Riau dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Atas*.
- Muhammad Fadhil Al Faiq dan Suryaningsih. 2021. "Hak Anak Penyandang Disabilitas Untuk Sekolah", *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Volume 1, No. 2,
- Yulianti, Ni Putu Rai, 2021. "Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Buleleng", *Jastitia Jurnal Hukum*, Volume 1, No. 6.

Ndaumanu, Frichy, 2020. "Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah", *Jurnal Ham*, Volume 11, No. 1.

Jogiyanto. 1999 .<https://definisimenurutparaahli.blogspot.co.id/2016/12/aplikasi-menurut-para-ahli.html>

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bengkalis Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945..

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah